

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (STUDI PADA SUB KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA DI KELURAHAN KALIJAGA KOTA CIREBON)

Muhammad Fathan Hadian¹; Ramadhan Pancasilawan²

^{1,2}Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran,
Bandung, Indonesia
email : muhammad21033@mail.unpad.ac.id

Submitted: 26-01-2025; Accepted: 07-05-2025; Published : 07-06-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana oleh BPBD Kota Cirebon, dengan fokus pada Kelurahan Kalijaga sebagai wilayah rawan bencana banjir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Thomas B. Smith (1973), yang meliputi empat dimensi: kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah dirancang sesuai dengan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, namun implementasinya menghadapi beberapa kendala. Pada dimensi kebijakan yang diidealkan, meskipun panduan pelaksanaan tersedia, tidak terdapat indikator keberhasilan spesifik yang dapat mengukur dampak penyuluhan. Pada dimensi kelompok sasaran, masyarakat menunjukkan respons positif terhadap penyuluhan, namun tingkat partisipasi masih terbatas karena kendala waktu dan aktivitas masyarakat. Pada dimensi organisasi pelaksana, keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama, dengan hanya satu jabatan penyuluh bencana yang bersertifikasi yang bertugas untuk seluruh wilayah Kota Cirebon. Pada dimensi faktor lingkungan, tidak terdapat hambatan utama yang memengaruhi pelaksanaan penyuluhan. Hambatan yang ada lebih bersifat teknis, seperti variasi peserta yang memengaruhi penyesuaian materi penyuluhan. Penelitian ini merekomendasikan penambahan tenaga penyuluh, penguatan evaluasi pada proses sub kegiatan, dan peningkatan fleksibilitas metode pelaksanaan penyuluhan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Kata kunci: implementasi program, penganggulangan bencana, pelatihan pencegahan, mitigasi bencana

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Disaster Prevention and Mitigation Training sub-activities by BPBD Cirebon City, with a focus on Kalijaga Village as a flood-prone area. This research uses a qualitative method with a policy implementation theory approach from Thomas B. Smith (1973), which includes four dimensions: idealized policies, groups, and groups. Smith (1973), which includes four dimensions: idealized policies, target groups, implementing organizations, and environmental factors. The results show that the policy has been designed in accordance with Permendagri Number 101/2018, but its implementation faces several obstacles. In the idealized policy dimension, although implementation guidelines are available, there are no specific success indicators that can measure the impact of extension. In the target group dimension, the community shows a positive response to the counseling, but the level of participation is still limited due to time constraints and community activities. In the implementing organization dimension, limited human resources were the main challenge, with only one certified disaster extension officer assigned to the entire Cirebon City area. In the dimension of environmental factors, there are no major obstacles that affect the implementation of counseling. The barriers that existed were more technical in nature, such as variations in participants that affected the adjustment of extension materials. This study recommends the addition of extension workers,

strengthening the evaluation of the sub-activity process, and increasing the flexibility of extension implementation methods to reach more people.

Keyword: : *program implementation, disaster countermeasure, prevention training, disaster mitigation*

PENDAHULUAN

Indonesia berada di lokasi di mana tiga lempeng tektonik utama dunia berkumpul, yaitu: Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik yang menjadikan wilayah Indonesia sangat aktif secara geologis. Hal ini tidak hanya menyebabkan tingginya frekuensi gempa bumi, tetapi juga membentuk deretan gunung berapi yang membentang sepanjang kepulauan, dikenal sebagai bagian dari Cincin Api Pasifik. Terdapat 127 gunung berapi aktif di Indonesia, yang merupakan sekitar 13% dari semua gunung berapi aktif di dunia. Selain ancaman geologis, Indonesia juga menghadapi risiko tinggi dari bencana hidrometeorologi. Perubahan iklim global telah meningkatkan intensitas dan frekuensi bencana seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem lainnya. Di banyak wilayah Indonesia, deforestasi dan konversi lahan telah memperburuk efek bencana ini, meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor, terutama di wilayah dengan topografi yang rentan. Menurut laporan dari World Risk Report (WRR) 2023 (Frege et al., 2023) Indonesia menjadi negara dengan risiko Bencana alam tertinggi kedua di dunia setelah Filipina. Hasil dari perhitungan indeks risiko bencana yang dilakukan oleh WRR berdasarkan tingkat keterpaparan dan kerentanan suatu negara terhadap bencana alam disebut world risk index (WRI). Indonesia memiliki (WRI) sebesar 43,5 dari 100, hanya di bawah Filipina yang berada di urutan pertama dengan angka 46,86 dan India yang berada di posisi ketiga dengan angka 41,52.

Dengan kondisi dan data yang ada Indonesia telah menyadari akan pentingnya manajemen risiko bencana yang efektif melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum yang utama dalam rangka upaya mitigasi dan penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia. Melalui landasan hukum ini, program-program manajemen risiko bencana menjadi prioritas negara yang kemudian diturunkan ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adapun penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian

upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam merespons kondisi wilayah Indonesia yang rawan akan bencana alam, penting untuk memikirkan langkah awal terlebih dahulu sebelum terjadi bencana dengan mitigasi bencana maupun kesiapsiagaan. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Kota Cirebon merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem. Berdasarkan hasil penelitian oleh Aisy & Kurniawan (2024), klusterisasi data bencana di Kota Cirebon menunjukkan bahwa wilayah Kelurahan Kalijaga termasuk dalam kawasan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana banjir. Wilayah ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta sistem drainase yang kurang optimal, yang menyebabkan akumulasi air hujan tidak terkelola dengan baik. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, setidaknya tercatat empat kejadian banjir yang berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Merujuk pada kondisi tersebut, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana menjadi salah satu langkah penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BPBD. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga risiko yang ditimbulkan dapat diminimalisasi. Program ini tidak hanya bertumpu pada aspek penanggulangan pascabencana, tetapi juga berorientasi pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana sejak dini. (Abas, 2022., Aryani & Mashur, 2024., Ahmad et al., 2024., Febriani et al., 2023)

Studi yang dilakukan oleh Apriyanti, (2019) di Yogyakarta menunjukkan bahwa keberhasilan program mitigasi melalui Sekolah Siaga Bencana sangat dipengaruhi oleh peran aktif masyarakat dan kolaborasi antar aktor, termasuk BPBD, pihak sekolah, dan lingkungan sekitar. Sementara itu, penelitian oleh Ahmad et al., (2024) di Kabupaten Pasaman menekankan pentingnya ketersediaan sumber daya, komunikasi yang efektif, serta struktur organisasi yang mendukung sebagai faktor kunci dalam pelaksanaan program pengurangan risiko

bencana oleh BPBD. Dua studi tersebut menunjukkan pendekatan partisipatif dan dukungan kelembagaan bahwa implementasi program mitigasi membutuhkan yang kuat.

Tabel 1 Jumlah Kejadian Bencana di Kota Cirebon Tahun 2021-2023

No.	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian			Total
		2021	2022	2023	
1.	Pohon Tumbang	48	47	54	149
2.	Rumah Ambruk	24	24	19	67
3.	Kebakaran Lahan	0	0	17	17
4.	Banjir	2	5	3	10
5.	Tanah Longsor	4	3	2	9
6.	Pencarian Pertolongan Korban Tenggelam	3	2	2	7
7.	Banjir Rob	0	7	0	7
8.	Cuaca Ekstrem	1	2	4	7
9.	Genangan	0	6	0	6
10.	Pergerakan Tanah	1	1	1	3
11.	Pinggiran Sungai Longsor	0	1	2	3
12.	Gempa Bumi	0	0	3	3
13.	Angin Puting Beliung	1	1	0	2
14.	Senderan Sungai Ambruk	1	0	0	1
15.	Kekeringan	0	0	1	1
	TOTAL	85	99	108	292

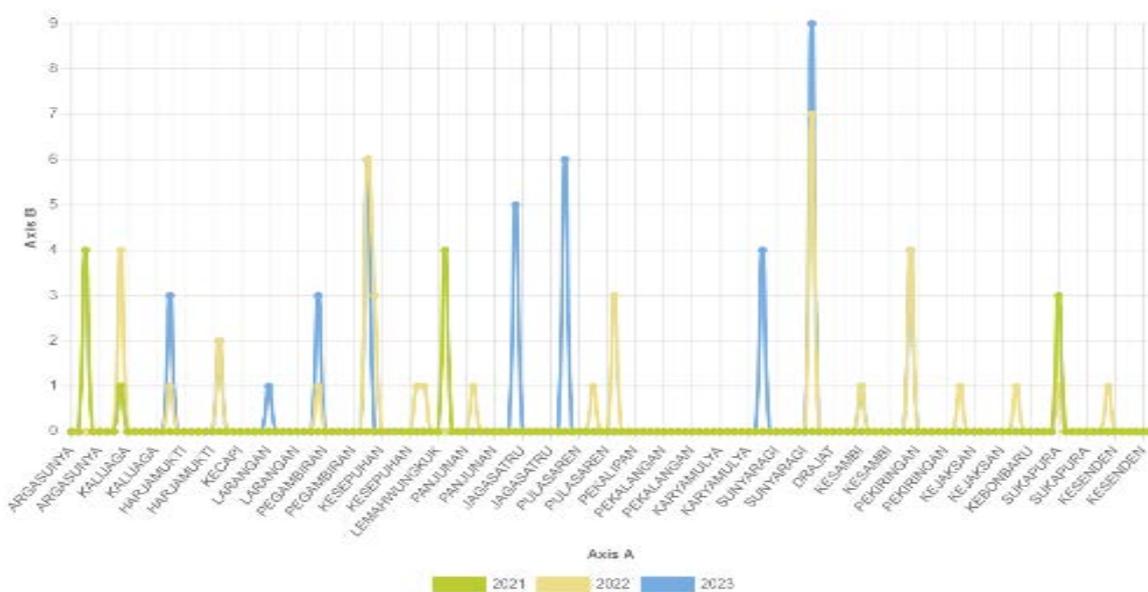
Sumber: BPBD Kota Cirebon, 2024

Berdasarkan data jumlah kejadian bencana di Kota Cirebon Tahun 2021 hingga 2023, terdapat 15 jenis bencana di Kota Cirebon. Pohon Tumbang menjadi bencana terbanyak dengan jumlah 149 kejadian. Kemudian, nomor dua terdapat Rumah Ambruk dengan 67 kejadian, yang ketiga Kebakaran Lahan dengan 17 kejadian, dan diikuti dengan Banjir dengan 10 kejadian. Jika di lihat dari segi jumlah kejadian bencana dari tahun 2021 hingga 2023, jumlah ini mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Tahun 2021 terdapat total 85 kejadian, tahun 2022 bertambah menjadi 99 kejadian dan yang tahun 2023 dengan 108 kejadian. Data terbaru dari BPBD Kota Cirebon menyebutkan bahwa sejauh ini terdapat total 98 kejadian bencana pada periode

Bulan Januari-Agustus tahun 2024. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah kejadian bencana dari tahun ke tahun di Kota Cirebon selalu bertambah, hal ini harus menjadi sinyal penting bagi pemerintah Kota Cirebon dan juga BPBD Kota Cirebon untuk selalu waspada dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana.

Peningkatan frekuensi bencana alam ini, menunjukkan kebutuhan mendesak akan strategi mitigasi yang lebih efektif dan komprehensif. Pemerintah Daerah Kota Cirebon, melalui dengan, perlu mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program-program mitigasi yang berbasis pada analisis risiko yang akurat.

Gambar 1 Jumlah Kawasan Rawan Bencana di Kota Cirebon



Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2024

Dari data di atas, dapat dilihat terjadi peningkatan pada kawasan rawan bencana di Kota Cirebon dari tahun 2021 hingga 2023. Salah satu contohnya ada pada Kelurahan Drajat pada tahun 2021 memiliki 0 kawasan rawan bencana, kemudian pada tahun 2022 menjadi 7 kawasan rawan bencana dan pada tahun 2023 menjadi 9 kawasan rawan bencana. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa Kota Cirebon mengalami peningkatan jumlah kawasan rawan bencana dari tahun ke tahun. Maka dari itu, penting untuk Kota Cirebon memiliki program mitigasi bencana yang baik untuk melakukan pengurangan risiko bencana lebih awal dari sebelum terjadi bencana dan mengurangi dampak dari bencana. Kerentanan yang terjadi akibat dari meningkatnya daerah rawan bencana di Kota Cirebon menjadikan mitigasi bencana sebagai sebuah keharusan yang tidak bisa diabaikan. Mengingat kemungkinan bencana telah meningkat di Kota Cirebon, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi dampak negatif. Bencana-bencana ini dapat sangat merugikan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan jika tidak ada upaya pencegahan dan mitigasi yang kuat.

Selain itu, dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Salah satu bentuk implementasi pelayanan dasar ini adalah melalui penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan kebencanaan yang menasar masyarakat secara langsung, guna meningkatkan kapasitas dan kesadaran akan risiko bencana di lingkungan tempat tinggal mereka. Pelayanan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari kewajiban minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan penyuluhan bukan sekadar inisiatif tambahan, melainkan bagian dari mandat formal yang memiliki urgensi strategis dalam pembentukan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Ketaatan terhadap regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan keselamatan warganya melalui upaya sistematis dan berkelanjutan, khususnya di wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana seperti Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon.

Dari Permendagri tersebut, kemudian diturunkan ke dalam Renstra BPBD Kota Cirebon Tahun 2024-2026 yang di dalamnya terdapat Sub Kegiatan Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi Bencana atau yang biasa disebut dengan

Penyuluhan Mitigasi Bencana, dalam pengimplementasiannya terdapat beberapa hal yang menghambat dan perlu diperhatikan lebih dalam sebagai indikasi masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Beban kerja yang terlalu banyak pada Pelaksanaan Penyuluhan Mitigasi Bencana.
2. Target sasaran masyarakat yang tidak sesuai dengan kondisi faktual.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis ingin membahas lebih jauh dalam bentuk penelitian yang berjudul “Implementasi Program Penanggulangan Bencana (Studi Pada Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon)”.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, penulis akan menggunakan teori dari Thomas B. Smith (1973) untuk memahami dan menganalisis implementasi program penyuluhan mitigasi bencana di Kota Cirebon. Teori ini memiliki 4 dimensi yang menentukan keberhasilan implementasi program, yaitu:

- 1) Kebijakan yang diidealkan (*Idealized Policy*) Pola-pola interaksi ideal yang sudah terjadi akan menghasilkan kondisi yang relevan dengan masyarakat. Dalam kata lain, kebijakan harus sesuai dengan kondisi faktual yang ada di masyarakat Kota Cirebon serta pola interaksi yang terjadi pada kebijakan ini dapat memberikan dorongan pelaksanaan program penyuluhan mitigasi bencana ini.
- 2) Kelompok Sasaran (*Target Groups*) Ketepatan sasaran pada suatu program merefleksikan bahwa pemerintah berhasil memenuhi dan merespons kebutuhan masyarakat dengan cermat. Dalam penelitian ini, penting bagi program penyuluhan mitigasi bencana menjadi program yang tepat bagi kebutuhan masyarakat. Semakin program ini mampu merespons kebutuhan masyarakat secara akurat, semakin baik juga kesejajaran antara program dan kelompok sasarannya. Dengan demikian, program ini akan diterima secara positif oleh masyarakat tanpa adanya penolakan.
- 3) Organisasi Pelaksana (*Implementing Organization*) Dalam hal ini bagaimana peran organisasi pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan Program Penyuluhan Mitigasi Bencana di Kota Cirebon, baik dari segi aturan, sumber daya yang ada, dan keterlibatan berbagai stakeholder
- 4) Faktor Lingkungan (*Environmental Factor*) Kondisi lingkungan tentu akan memengaruhi dalam implementasi program mitigasi

bencana di Kota Cirebon, terutama pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian terkait implementasi program penanggulangan bencana di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon menggunakan pendekatan kualitatif. (Creswell, 2019). Dasar penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah penulis dapat memahami secara mendalam dan mengungkap berbagai masalah secara cermat dengan mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang terjadi secara tertulis mengenai implementasi program penanggulangan bencana di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dari berbagai sumber adalah melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Proses analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu proses pengolahan dan analisis data, pengujian validitas dan reabilitas data, dan penafsiran data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan memaparkan temuan penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya yang berkenaan dengan implementasi program penanggulangan bencana di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon. Adapun hasil dari penelitian yang telah diperoleh melalui wawancara serta studi dokumentasi adalah sebagai berikut:

A. *Idealized Policy*

Idealized Policy atau kebijakan yang diidealkan menjadi dasar utama keberhasilan implementasi program. Dalam konteks penyuluhan mitigasi bencana di Kota Cirebon, kebijakan ini mengacu pada Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah. Peraturan ini menjadi acuan dalam Renstra BPBD Kota Cirebon 2024-2026, yang mencantumkan program penyuluhan sebagai bagian dari strategi peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

BPBD Kota Cirebon telah melaksanakan penyuluhan mitigasi bencana secara terencana dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan aparatur pemerintah dalam menghadapi bencana melalui edukasi dan pelatihan. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa program ini cukup relevan dengan kondisi masyarakat Cirebon, yang rawan bencana seperti banjir dan cuaca ekstrem.

Kegiatan penyuluhan disesuaikan dengan karakteristik bencana di masing-masing wilayah. Misalnya, Kelurahan Kalijaga sering mengalami banjir, sehingga penyuluhan di daerah ini lebih

menekankan pada strategi pencegahan dan mitigasi banjir. Masyarakat yang mengikuti penyuluhan merasa bahwa edukasi yang diberikan sangat bermanfaat karena sesuai dengan kondisi nyata yang mereka hadapi.

BPBD Kota Cirebon menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan dalam pelaksanaan program. Namun, SOP ini masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal evaluasi. Belum ada panduan yang mengatur mekanisme evaluasi pelaksanaan penyuluhan secara langsung. Akibatnya, pengawasan terhadap efektivitas program menjadi kurang optimal.

Selain itu, belum terdapat indikator khusus untuk mengukur keberhasilan penyuluhan, selain dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Artinya, meskipun program ini telah dilaksanakan, belum ada parameter konkret yang menunjukkan seberapa besar dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu tantangan yang muncul adalah bagaimana mengukur apakah masyarakat yang telah mengikuti penyuluhan benar-benar mampu menerapkan langkah-langkah mitigasi bencana secara mandiri.

Dari sudut pandang penerima manfaat, masyarakat tidak hanya berperan sebagai peserta pasif, tetapi juga dilibatkan dalam kegiatan seperti pemetaan lokasi bencana dan jalur evakuasi. Partisipasi aktif ini meningkatkan pemahaman mereka terhadap risiko bencana dan langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan.

Secara keseluruhan, meskipun program penyuluhan telah memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan daerah, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Evaluasi yang lebih terstruktur dan indikator keberhasilan yang lebih jelas diperlukan agar dampak program dapat diukur dengan lebih baik.

B. *Target Groups*

Kelompok sasaran (*Target Groups*) dalam implementasi penyuluhan mitigasi bencana di Kota Cirebon telah ditentukan secara sistematis. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sasaran utama dari penyuluhan ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, terutama wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap banjir, kebakaran, dan bencana lainnya.

Penentuan kelompok sasaran ini mengacu pada Renstra BPBD Kota Cirebon 2024-2026, yang membagi peserta penyuluhan secara bertahap setiap tahunnya. Data dari BPBD menunjukkan bahwa terdapat sekitar 20.000 jiwa yang berada di wilayah rawan bencana. Hingga saat ini hampir seluruh wilayah Kota Cirebon sudah diberikan penyuluhan dengan berbagai tingkat, yaitu tingkat kecamatan, kelurahan, RT/RW, dan prioritas kejadian bencana. Namun, karena keterbatasan anggaran dan sumber daya, BPBD tidak dapat menjangkau seluruh sasaran dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, penyuluhan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan tingkat prioritas daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi.

Selain masyarakat umum, BPBD juga melaksanakan penyuluhan di perusahaan, BUMD, rumah sakit, dan sekolah-sekolah di Kota Cirebon. Undangan dari institusi ini menunjukkan bahwa kesadaran tentang pentingnya mitigasi bencana tidak hanya terbatas pada masyarakat umum, tetapi juga telah menjadi perhatian di sektor swasta dan pendidikan. Misalnya, di rumah sakit, materi penyuluhan lebih menekankan pada evakuasi pasien dan penggunaan alat darurat, sedangkan di sekolah, penyuluhan lebih berfokus pada edukasi dini terkait simulasi bencana dan pengenalan jenis-jenis bencana yang sering terjadi di Cirebon.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi penyuluhan ini adalah tingkat kehadiran masyarakat yang rendah. Hal ini disebabkan oleh mayoritas peserta merupakan pekerja informal yang sulit meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikuti kegiatan penyuluhan. Selain itu, karena mekanisme undangan sering kali diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang aktif, penyuluhan ini cenderung lebih banyak dihadiri oleh mereka yang telah terbiasa berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Akibatnya, sebagian besar masyarakat lainnya, terutama mereka yang kurang aktif dalam kegiatan sosial, belum mendapatkan edukasi secara langsung.

Untuk mengatasi masalah ini, BPBD telah berupaya mendorong peserta penyuluhan untuk menyebarluaskan informasi yang mereka peroleh kepada lingkungan sekitar mereka. Harapannya, meskipun hanya sebagian masyarakat yang mengikuti penyuluhan secara langsung, informasi mengenai mitigasi bencana tetap dapat tersebar luas di masyarakat. Namun, metode ini masih memiliki kelemahan karena efektivitasnya sulit diukur dan penyampaian informasi dari peserta ke masyarakat lainnya tidak selalu konsisten.

Selain menghadapi tantangan dalam tingkat partisipasi, BPBD juga dihadapkan pada tantangan teknis dalam pemilihan sasaran penyuluhan. Karena keterbatasan anggaran, BPBD belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara serentak. Untuk mengatasinya, BPBD menggunakan pendekatan berbasis prioritas, yaitu dengan menargetkan wilayah yang belum pernah mendapatkan penyuluhan sebelumnya.

Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, pelaksanaan penyuluhan mitigasi bencana di Kota Cirebon telah menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan wawancara dengan peserta, mayoritas mereka menganggap bahwa edukasi ini sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan rawan bencana. Namun, agar lebih efektif, BPBD perlu memperluas jangkauan program ini dengan

melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat serta menyesuaikan jadwal pelaksanaan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat agar lebih banyak peserta yang dapat mengikuti penyuluhan.

C. *Implementing Organization*

Organisasi pelaksana dalam implementasi penyuluhan mitigasi bencana di Kota Cirebon adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon. Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana di tingkat daerah, BPBD memiliki peran utama dalam memastikan bahwa program penyuluhan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks teori Thomas B. Smith, efektivitas organisasi pelaksana sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Namun, BPBD Kota Cirebon menghadapi beberapa kendala struktural dan operasional, terutama dalam hal sumber daya manusia, fasilitas, dan sistem evaluasi program.

1. *Keterbatasan Tenaga Penyuluh*

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BPBD Kota Cirebon adalah kurangnya tenaga penyuluh bencana. Hingga saat ini, BPBD hanya memiliki satu orang penyuluh bencana untuk mencakup seluruh Kota Cirebon. Padahal, menurut Analisis Beban Kerja (ABK) BPBD, idealnya diperlukan tiga penyuluh agar penyuluhan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh, BPBD sering melibatkan tim Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dalam pelaksanaan penyuluhan. Namun, tim Pusdalops seharusnya lebih berfokus pada pemantauan dan penanganan bencana, sehingga pelibatan mereka dalam penyuluhan sering kali mengurangi efektivitas mereka dalam tugas utama.

Selain itu, pelatihan untuk staf yang terlibat dalam penyuluhan masih sangat terbatas. Hingga saat ini, hanya tiga orang staf BPBD yang telah mengikuti Pelatihan Dasar Manajemen Bencana (DMB). Pelatihan ini menjadi syarat untuk mengikuti pelatihan lanjutan yang diselenggarakan oleh BNPB, namun karena program pelatihan dari BNPB semakin jarang diselenggarakan, jumlah staf terlatih pun masih sedikit.

2. *Keterbatasan Fasilitas dan Alat Edukasi*

Selain keterbatasan tenaga penyuluh, BPBD juga mengalami kekurangan alat dan fasilitas yang mendukung kegiatan penyuluhan. Salah satu contoh yang sering disebutkan oleh informan adalah tidak adanya simulator gempa, yang seharusnya dapat meningkatkan daya tarik dan efektivitas penyuluhan bagi masyarakat.

Saat ini, penyuluhan lebih banyak

dilakukan secara konvensional melalui ceramah dan diskusi, tanpa banyak menggunakan alat bantu interaktif. Padahal, dengan adanya fasilitas seperti simulator gempa, video edukatif, atau peralatan evakuasi yang dapat diuji langsung oleh peserta, efektivitas penyuluhan bisa meningkat secara signifikan.

Dari segi operasional, BPBD sebenarnya memiliki kendaraan operasional yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan ke berbagai wilayah di Kota Cirebon. Namun, alokasi dana untuk pemeliharaan fasilitas dan pengadaan alat edukasi masih sangat terbatas, sehingga program penyuluhan belum bisa dijalankan secara maksimal.

3. Kurangnya Sistem Evaluasi Program

Dalam implementasi penyuluhan mitigasi bencana, evaluasi menjadi faktor penting untuk menilai efektivitas program dan melakukan perbaikan di masa mendatang. Namun, hingga saat ini BPBD Kota Cirebon belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang formal untuk mengukur keberhasilan penyuluhan.

Evaluasi yang dilakukan masih bersifat informal dan hanya berdasarkan observasi sederhana dari para staf BPBD. Misalnya, di sekolah-sekolah, BPBD biasanya mengamati apakah siswa yang mengikuti penyuluhan pada tahun sebelumnya masih mengingat materi yang diberikan. Namun, tidak ada alat ukur resmi yang dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai efektivitas penyuluhan di masyarakat.

Ketiadaan sistem evaluasi ini menyebabkan BPBD sulit untuk menilai apakah penyuluhan telah benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Selain itu, tidak adanya indikator keberhasilan yang jelas membuat program ini sulit untuk dikembangkan lebih lanjut.

4. Kurangnya Koordinasi dengan Organisasi Kebencanaan Lain

Saat ini, BPBD Kota Cirebon sudah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dalam pelaksanaan penyuluhan, seperti kelurahan dan dinas-dinas terkait. Namun, kerja sama dengan organisasi kebencanaan non-pemerintah masih sangat terbatas.

Padahal, banyak organisasi kebencanaan yang memiliki sumber daya, tenaga ahli, dan alat yang dapat mendukung keberhasilan penyuluhan. Misalnya, kerja sama dengan lembaga seperti Palang Merah Indonesia (PMI) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kebencanaan dapat membantu BPBD dalam menjangkau lebih banyak masyarakat serta menyediakan materi edukasi yang lebih berkualitas.

Dalam wawancara dengan salah satu informan dari BPBD, disebutkan bahwa mereka

berencana untuk memperkuat kerja sama dengan organisasi kebencanaan di tahun mendatang. Namun, hingga saat ini belum ada sistem formal yang mengatur mekanisme kolaborasi tersebut.

Sebagai organisasi pelaksana, BPBD Kota Cirebon telah berusaha menjalankan program penyuluhan mitigasi bencana sesuai dengan Permendagri No. 101 Tahun 2018 dan Renstra BPBD 2024-2026. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain: Keterbatasan tenaga penyuluh yang membuat pelaksanaan program menjadi kurang optimal; Kurangnya fasilitas dan alat edukasi untuk mendukung penyuluhan yang lebih interaktif dan efektif; Tidak adanya sistem evaluasi formal, sehingga sulit untuk mengukur dampak nyata dari penyuluhan; Minimnya kerja sama dengan organisasi kebencanaan lain, yang seharusnya dapat membantu meningkatkan efektivitas program.

Untuk meningkatkan kualitas program penyuluhan, BPBD perlu memperkuat sumber daya manusia dengan menambah jumlah penyuluh, memperbaiki sistem evaluasi, serta menjalin kerja sama dengan lebih banyak organisasi kebencanaan. Dengan strategi yang lebih terencana dan berbasis data, program penyuluhan ini dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana di Kota Cirebon.

D. Environmental Factor

Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan implementasi penyuluhan mitigasi bencana di Kota Cirebon. Dalam teori Thomas B. Smith, faktor lingkungan mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan geografis, yang semuanya dapat mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan atau program.

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi daerah dan masyarakat menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi penyuluhan mitigasi bencana. Dari sisi pemerintah, alokasi anggaran untuk program ini masih terbatas, sehingga BPBD hanya dapat melaksanakan penyuluhan dalam skala terbatas sesuai dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat juga berdampak pada tingkat partisipasi dalam penyuluhan. Banyak warga di Kota Cirebon yang bekerja sebagai buruh, pedagang, atau pekerja informal yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka hanya untuk menghadiri penyuluhan. Akibatnya, banyak penyuluhan yang dilaksanakan pada jam kerja mengalami tingkat kehadiran yang rendah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program penyuluhan harus lebih

fleksibel, misalnya dengan menjadwalkan sesi pada sore hari atau akhir pekan agar lebih banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi. Selain itu, penyuluhan bisa dilakukan dengan pendekatan *door-to-door* untuk menjangkau mereka yang tidak bisa menghadiri sesi tatap muka.

2. Faktor Sosial dan Budaya

Dari sisi sosial, tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh besar terhadap efektivitas penyuluhan. Masyarakat dengan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mudah memahami konsep mitigasi bencana dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih rendah, pendekatan edukasi harus disesuaikan dengan cara yang lebih sederhana dan visual.

Budaya masyarakat juga berpengaruh terhadap penerimaan mereka terhadap penyuluhan mitigasi bencana. Beberapa kelompok masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa bencana adalah fenomena alam yang tidak dapat dicegah, sehingga mereka kurang tertarik untuk mengikuti pelatihan kesiapsiagaan bencana.

Untuk mengatasi hambatan budaya ini, BPBD perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan berbasis pengalaman nyata. Misalnya, dengan menampilkan testimoni dari korban bencana yang berhasil selamat karena mengikuti pelatihan mitigasi.

3. Faktor Geografis

Secara geografis, Kota Cirebon relatif mudah diakses, sehingga faktor ini tidak menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan penyuluhan. Namun, variasi lokasi penyuluhan tetap menjadi tantangan bagi BPBD karena mereka harus menyesuaikan metode penyampaian dengan kondisi di masing-masing wilayah.

Sebagai contoh, di wilayah perkotaan, penyuluhan lebih efektif dilakukan dalam bentuk seminar atau diskusi kelompok. Namun, di daerah yang lebih terpencil atau padat penduduk, penyuluhan harus lebih praktis dan langsung melibatkan masyarakat dalam simulasi nyata agar mereka lebih memahami langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Selain itu, beberapa wilayah di Kota Cirebon sering mengalami banjir yang membuat akses ke lokasi penyuluhan menjadi sulit. Dalam situasi seperti ini, BPBD harus lebih fleksibel dalam menentukan metode penyampaian, misalnya dengan menggunakan media digital atau penyuluhan berbasis komunitas.

4. Faktor Politik dan Kebijakan

Dari sisi politik, implementasi penyuluhan mitigasi bencana mendapatkan dukungan dari berbagai sektor melalui konsep Pentahelix, yang melibatkan pemerintah,

masyarakat, swasta, akademisi, dan media. Dukungan dari sektor swasta dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) juga membantu dalam penyediaan fasilitas dan alat edukasi.

Namun, BPBD Kota Cirebon masih menghadapi beberapa tantangan dalam aspek regulasi dan birokrasi. Salah satu kendala yang sering muncul adalah proses administrasi yang panjang dalam pengalokasian anggaran, sehingga dana untuk pelaksanaan penyuluhan sering kali terlambat cair.

Selain itu, meskipun BPBD telah memiliki pedoman kebijakan yang jelas dalam bentuk Permendagri No. 101 Tahun 2018, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, terutama dalam hal evaluasi dan monitoring program.

5. Hambatan dalam Implementasi Akibat Faktor Lingkungan

Salah satu hambatan utama yang dihadapi BPBD dalam implementasi penyuluhan adalah keterbatasan fasilitas dan peralatan yang dapat digunakan oleh masyarakat setelah penyuluhan selesai.

Misalnya, dalam penyuluhan mitigasi banjir di Kelurahan Kalijaga, masyarakat sering kali meminta bantuan berupa perahu karet dan alat evakuasi lainnya. Namun, BPBD tidak memiliki anggaran khusus untuk menyediakan alat-alat tersebut secara gratis kepada masyarakat, karena fokus mereka lebih pada edukasi dan peningkatan kesiapsiagaan.

Selain itu, karena tidak adanya mekanisme evaluasi yang formal, sulit bagi BPBD untuk menilai apakah masyarakat benar-benar menerapkan ilmu yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah membentuk kelompok relawan bencana di setiap kelurahan, sehingga edukasi yang diberikan dapat terus dipraktikkan oleh masyarakat setempat.

6. Peluang Pengembangan Penyuluhan dengan Memanfaatkan Teknologi

Salah satu cara untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi penyuluhan mitigasi bencana adalah dengan memanfaatkan teknologi digital. Saat ini, penggunaan media sosial dan aplikasi berbasis komunitas masih belum dioptimalkan oleh BPBD Kota Cirebon.

Jika BPBD dapat memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi mitigasi bencana, maka cakupan penyuluhan dapat diperluas tanpa terbatas oleh faktor waktu dan tempat. Misalnya, BPBD dapat mengembangkan video edukasi tentang mitigasi bencana yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat.

Selain itu, penyuluhan daring melalui webinar atau grup diskusi *online* juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak bisa menghadiri sesi penyuluhan secara langsung.

Faktor lingkungan berperan besar dalam menentukan efektivitas penyuluhan mitigasi bencana di Kota Cirebon. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi: Kondisi ekonomi masyarakat yang menghambat partisipasi dalam penyuluhan, karena banyak warga tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka; Tingkat pendidikan dan budaya masyarakat yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap mitigasi bencana; Tantangan geografis dalam menjangkau berbagai wilayah dengan metode penyuluhan yang tepat; Hambatan politik dan birokrasi dalam alokasi anggaran serta evaluasi program; Kurangnya fasilitas mitigasi bencana di tingkat masyarakat, yang membuat mereka sulit menerapkan ilmu yang telah dipelajari dalam penyuluhan; Namun, dengan pemanfaatan teknologi digital dan strategi komunikasi yang lebih efektif, BPBD dapat mengatasi berbagai kendala ini dan meningkatkan efektivitas program penyuluhan di masa mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dianalisis oleh peneliti pada Bab IV mengenai Implementasi Program Penyuluhan, ditemukan pada dimensi Idealized Policy atau kebijakan yang diidealkan BPBD Kota Cirebon sudah memiliki landasan hukum yang jelas untuk melaksanakan sub kegiatan penyuluhan. Mereka mengacu pada Permendagri No. 101 Tahun 2018. Sub kegiatan ini relevan dengan kondisi Kota Cirebon sebagai daerah yang rawan bencana. Kemudian, terdapat salah satu hal yang dapat ditingkatkan, yaitu evaluasi secara spesifik dan indikator keberhasilan program. Evaluasi masih terbatas pada pemenuhan SPM tanpa mengukur dampak riil pada masyarakat.

Pada aspek Target Groups, kelompok sasaran telah ditetapkan berdasarkan data dari Renstra yang juga mengacu pada Permendagri, yaitu masyarakat di daerah rawan bencana. Kemudian, anggaran program ini perlu ditingkatkan sehingga dapat menjangkau seluruh target sekitar 20.000 jiwa di Kota Cirebon secara langsung.

Selanjutnya, dari sisi Implementing Organization, BPBD Kota Cirebon sudah memiliki kapasitas untuk melaksanakan program sesuai dengan SPM. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan kembali seperti sumber daya berupa dana, fasilitas, dan alat untuk pelaksanaan penyuluhan secara optimal.

Pada Environmental Factor, kondisi ekonomi, sosial, politik, dan geografis sudah mendukung program ini dengan baik. Selanjutnya pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi dapat ditingkatkan kembali.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil pembahasan yang telah dianalisis oleh peneliti pada Bab IV mengenai Implementasi Program Penyuluhan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Penanggulangan Bencana pada Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana di Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon sudah berjalan sesuai dengan konsep implementasi program yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith yang memiliki 4 (empat) dimensi, yaitu Idealized Policy, Target Groups, Implementing Organization, dan Environmental Factor.

Adapun saran-saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan indikator keberhasilan program secara spesifik.
2. Mengintegrasikan evaluasi pada SOP yang ada.
3. Melakukan pendekatan jemput bola, seperti penyuluhan di lokasi yang dekat dengan Masyarakat.
4. Berkolaborasi dengan lembaga eksternal, seperti perusahaan swasta untuk membuka peluang kerja sama.
5. Menambahkan tenaga ahli, terutama dengan jabatan penyuluh bencana.
6. Mengadakan pelatihan internal untuk meningkatkan kompetensi staf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, I. (2022). Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon Persepektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. *Focus: Jurnal of Law*, 3(1). <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ahmad, T., Roni Ekha Putera, & Hendri Koeswara. (2024). Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana Oleh BPBD Kabupaten Pasaman. *Journal of Social and Policy Issues*, 1, 45–53. <https://doi.org/10.58835/jspi.v4i1.303>
- Aisy, R., & Kurniawan, R. (2024). Klasterisasi Data Bencana Alam Di Kota Cirebon Menggunakan K-Means Clustering Berdasarkan Kawasan Dan Jenis Bencana. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(2), 2166–2171. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i2.9096>
- Apriyanti, W. (2019). Implementasi Program Mitigasi Bencana Melalui. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8 (2), 123–133.
- Aryani, J. D., & Mashur, D. (2024). Implementasi Program Mitigasi Kebakaran Lahan Dan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat PT. Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning. *Nusantara Journal of*

- Multidisciplinary Science*, 1(12), 786–795.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Febriani, T., Putri, R. E., & Wijaya, W. (2023). Implementasi Program Siaga Bencana di Sekolah Menengah Pertama pada Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Kecamatan Kayu Aro Kerinci. *Journal on Education*, 05(04), 12133–12139. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2173>
- Frege, I. A., Blicke, V., Bradshaw, S., Dijkzeul, D., Funke, C., Kienzl, P., Kusters, K., Masuch, L., Nasreen, M., Radtke, K., Schneider, S., Thielborger, P., Weller, D., Wieggers, O., Yaman, D. K., & Zennig, K. (2023). *WorldRiskReport 2023*.
- Namirah, S. A. (2015). Peran Organisasi Non Pemerintah Dalam Mitigasi Bencana (Studi Kasus Keluarga Peduli Pendidikan/Kerlip). *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 6(1), 36–45.
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing.
- Smith, T. B. (1973). The policy implementation process. *Policy Sciences*, 4(2), 197–209. <https://doi.org/10.1007/BF01405732>
- Suminto, M. R. (2015). *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur*.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (Issue 112). AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- UU No. 24 Tahun 2007. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*.